

**TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN
KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 1990 - 2005**



OLEH

ASRIATI

STB. 87 01 043

PERPUSTAKAAN FISIK UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	02-03-1994
Asal dari	Fak. Ekonomi
Penyaknya	(1satu) LTP
Harga	Hadiah
No. Inventaris	940310 0375
No. Klas	1135

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS EKONOMI
UJUNG PANDANG

1993

TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN
KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 1990 - 2005

Oleh

A S R I A T I

Stb. 87 01 043

SKRIPSI SARJANA LENGKAP DIAJUKAN GUNA MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA
EKONOMI JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN UJUNG PANDANG

DISETUJUI OLEH



Prof. Dr. H. RAHARDJO ADISASMITA, M.Ec.



Dr. M. M. PAPAYUNGAN, MA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan dan diselesaikan, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih adanya kekurangan dan kelemahan namun Penulis telah berusaha seoptimal mungkin. Pada kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati dan keikhlasan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa pikiran, dorongan petunjuk maupun bantuan berupa materi antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec. dan Bapak Dr. M.M. Papayungan, MA. masing-masing selaku konsultan yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam rangka penulisan skripsi ini.
2. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika yang telah membantu Penulis dalam proses belajar mulai dari awal hingga penyelesaian studi Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi Unhas.
3. Bapak Kepala Kanwil Depnaker, Kepala Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Bappeda Tingkan I Sulawesi Selatan beserta seluruh staf dan karyawan yang

telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data-data serta informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Buat seluruh rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan moril dalam proses belajar sampai tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih yang tiada taranya Penulis haturkan dihadapan Ayahanda Mustafa Kamal dan Ibunda Naderah Wolman serta Kakak dan Adik yang tercinta dan tak lupa juga buat seluruh keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan nama satu-per satu yang telah memberikan dorongan dalam bentuk bantuan moril dan materil kepada penulis selama dalam pendidikan hingga proses penyelesaian studi ini.

Akhir kata semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya. Tak ada kata yang dapat penulis sampaikan karena kebaikan dan tak ada harapan yang dapat penulis berikan atas bantuan semua pihak kecuali memohon balasan yang setimpal atas kebaikan dari Tuhan YME.
A m i n.

Ujung Pandang, Agustus 1993

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Hipotesis	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Analisis	9
Bab II METODOLOGI	11
2.1 Metode Analisis	11
2.2 Pembatasan Variabel	12
2.3 Pembatasan Unit Observasi	12
2.4 Daerah Penelitian	13
2.5 Jenis dan Sumber Data	13
2.6 Prosedur Pengumpulan Data	13
2.7 Tata urutan Isi Laporan	14
Bab III LANDASAN TEORITIK	16
3.1 Penduduk dan Masalahnya	17
3.2 Pengertian Tenaga Kerja	25
3.3 Pengertian Angkatan Kerja	29

	3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	33
	3.5 Kesempatan Kerja	35
Bab IV	SELAYANG PANDANG DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN	39
	4.1 Tinjauan Geografis	39
	4.2 Tinjauan Demografi	39
	4.3 Perkembangan Jumlah Angkatan kerja dan Tenaga kerja di Sulawesi Selatan	42
Bab V	KAJIAN ATAS PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA SELAMA TAHUN 1990 - 2005	45
	5.1 Analisis Terhadap Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Tenaga kerja periode tahun 1990 - 2005	45
	5.2 Tingkat Partisipasi Kerja	49
	5.3 Analisis Terhadap PDRB dan Kesempatan Kerja	50
	5.4 Analisis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	
Bab VI	SIMPULAN DAN SARAN	64
	6.1 Simpulan	64
	6.2 Saran-Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Selama Tahun 1984 - 1989	3
Tabel 2. Jumlah Murid Berdasarkan Usia Sekolah Pada Tahun 1990	42
Tabel 3. Perkembangan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 1980 - 1990	43
Tabel 4. Perkembangan Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan Tahun 1980 - 1990	44
Tabel 5. Perkiraan Penduduk, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan 1985 - 2005	48
Tabel 6. Tingkat Partisipasi Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 1985 - 2005	49
Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1983 Tahun 1987 - 1989	52
Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Harga Berlaku Tahun 1987 - 1989	53
Tabel 9. Elastisitas Kesempatan kerja Menurut Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan	58
Tabel 10. Proyeksi Penyerapan tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi di Sulawesi Selatan	62



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini oleh negara-negara sedang berkembang dihadapkan pada masalah laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga hal ini terasa sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut dan juga sekaligus merupakan salah satu ciri-ciri dari negara berkembang.

Demikian pula halnya di Indonesia yang oleh sebagian besar masyarakat dunia masih mengkategorikan negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang, juga tidak terlepas dari masalah penduduk ini, sehingga Pemerintah memusatkan perhatian melalui berbagai kebijaksanaannya melalui program pendidikan keluarga berencana, transmigrasi dan sebagainya.

Program yang dicanangkan pemerintah Indonesia di atas jelas memperlihatkan minat Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat kehidupan yang relatif belum memadai.

Indonesia tergolong sebagai negara agraris, maka tidaklah mengherankan apabila sebagian besar rakyatnya hidup dan berusaha di bidang pertanian serta tinggal di daerah pedesaan, dimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang berada di sektor pertanian ini memiliki produktivitas

yang masih relatif rendah, seperti yang dikemukakan oleh Michael Todaro bahwa :

"Mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya begitu rendah sehingga pengurangan dalam jam kerja tidak mempunyai pengaruh yang berarti atas produksi keseluruhan". 1)

Dengan melihat struktur penduduk Indonesia yang sebagian besar hidup dan bertempat tinggal di daerah pedesaan ini maka tentunya diupayakan agar terdapat keseimbangan kesempatan bekerja di antara masyarakat Indonesia yang ada, namun yang menjadi kendala adalah masalah rendahnya produktivitas kerja seperti yang dikemukakan oleh Michael Todaro di atas, akan sangat mempengaruhi upaya Pemerintah Indonesia untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri seperti yang termuat di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dengan rendahnya produktivitas kerja masyarakat pedesaan yang ada saat ini tentunya akan turut pula menyulitkan masyarakat pedesaan untuk bekerja di sektor ekonomi lainnya seperti pada sektor industri, sedangkan dilain pihak kita dapat melihat bahwa masalah pemilikan tanah yang ada sudah sangat memprihatinkan sebagai akibat pembangunan yang pesat, menyebabkan lahan-lahan pertanian semakin menyempit, menyebabkan harus ada perubahan menyangkut kesem-

1) Michael P. Todaro., Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang., Buku I, Terjemahan Drs. Nooroso Kuharjo. Jakarta : Akademika Pressindo, 1984.

patan memperoleh pekerjaan pada sektor selain pertanian.

Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 1990 menurut sensus yang diperoleh dari Biro Statistik Sulawesi Selatan sebanyak 6.980.589 jiwa yang terdiri dari pria 3.409.989 jiwa dan pria 3.570.600 jiwa. Luas wilayah 62.432,54 Km² atau rata-rata kepadatan penduduk 112 jiwa setiap 1 Km².

Berbicara masalah penduduk, maka kita tidak akan terlepas dari masalah ketenagakerjaan dimana seperti telah diuraikan sebahagian di atas bahwa masalah rendahnya produktivitas adalah salah satu kendala yang tidak dapat dihindari, selain masalah lahan pertanian yang semakin menyempit menyebabkan sebagian masyarakat mencoba untuk berusaha bekerja pada sektor ekonomi lainnya dimana menurut data statistik jumlah pencari kerja mengalami peningkatan yakni pada tahun 1989 sebesar 21.317 jiwa meningkat pada tahun 1990 sebesar 61.921 jiwa. Sedangkan banyaknya pencari kerja yang berhasil ditempatkan mengalami penurunan dari 18.562 jiwa tahun 1989 turun menjadi 4.510 jiwa pada tahun 1990; sebaliknya terhadap pencari kerja yang belum ditempatkan mengalami peningkatan dari 39.879 pada tahun 1989 naik menjadi 57.411 jiwa pada tahun 1990. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 01. Data Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Selama Tahun 1984 - 1989

PENDIDIKAN	J U M L A H PENC. KERJA	YANG DITEM- PATKAN	BELUM DI TEMPATKAN
Sek. Dasar	1.830	1.161	669
SLTP Umum	4.122	577	3.545
SLTP Kej.	492	44	448
SLTA Umum	24.060	780	23.465
Sarjana Muda	3.470	187	3.283
Sarjana	4.124	166	3.958
Jumlah 1990	61.921	4.510	57.411
1989	21.317	18.562	39.879

Sumber : Kantor Statistik Sulawesi Selatan
Tahun 1990

Dengan melihat kenyataan kepadatan penduduk serta masalah kesempatan kerja yang ada, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh dengan mengambil judul "Tinjauan Terhadap Perkembangan Penduduk, Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Propinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 1990 - 2005".

1.2 Rumusan Masalah

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dalam kaitannya dengan program pembangunan sektoral maupun regional senantiasa diupayakan agar terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin.

Hal ini berlaku pula di Propinsi Sulawesi Selatan

dalam mengatasi kelebihan tenaga kerja secara terpadu di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, maka sebagai pokok masalah dalam penyerapan tenaga kerja ini adalah :

- a) Jumlah angkatan kerja yang senantiasa meningkat terus dari tahun ke tahun yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja.
- b) Tenaga kerja yang ada seringkali belum mampu terserap/ditempatkan pada sektor ekonomi tertentu.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap maksud mengandung tujuan yang ingin dicapai, demikian pula halnya pada penelitian ini, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Penelitian

1. Sebagai alat guna mengaplikasikan ilmu-ilmu yang penulis pernah peroleh sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan pada Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tentang pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja serta kemungkinan penyebarannya ke sektor-sektor ekonomi di Sulawesi Selatan selama tahun 1990 - 2003.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

- b) Adapun sebagai kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi rekan-rekan mahasiswa

yang berminat membahas masalah kependudukan ini.

1.4 Hipotesis

Bertitiktolak dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan sebagai patokan duga sebagai berikut :

- a) Diduga, bahwa penyerapan tenaga kerja secara sektoral meningkat selama tahun 1990 - 2005
- b) Diduga pula, bahwa dengan meningkatnya produksi secara sektoral, maka akan meningkatkan pula tingkat kesempatan kerja.

1.5 Tinjauan Pustaka

Perluasan kesempatan kerja bagi surplus tenaga kerja pada salah satu sektor tertentu, senantiasa mendapat perhatian yang serius, khususnya dari pihak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu seluruh sektor ekonomi yang ada diupayakan untuk dikembangkan semaksimal mungkin. Saat ini salah satu sektor ekonomi yang menampung sebagian besar tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Secara sektoral pertanian menampung tenaga kerja yang berpendidikan relatif rendah sehingga tingkat produktivitas cenderung rendah pula.

Oleh karena itu untuk mengupayakan pemerataan kesempatan bekerja ke sektor ekonomi lainnya adalah alternatif yang tidak dapat ditunda lagi, namun upaya ini sedikit-tidaknya harus didukung pula oleh kemampuan keterampilan

lan dan pendidikan tenaga kerja tersebut, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang rendah yang pada akhirnya turut pula meningkatkan taraf hidup yang lebih layak lagi.

Dalam kaitannya dengan masalah rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja pada salah satu ekonomi yang ada Sadono Sukirno mengemukakan pendapatnya secara umum dalam bukunya "Ekonomi Pembangunan" mengatakan bahwa :

"Sebagai negara yang sedang berkembang, pada mulanya akan dihadapi masalah kekurangan tenaga kerja terampil dan terdidik, tetapi dalam jangka panjang hal ini dapat teratasi dengan memperluas pendidikan. Dengan demikian hambatan pembangunan yang terutama adalah kekurangan modal dan kekayaan alam yang terbatas". 2)

Selanjutnya Prof. J.H. Boeke mengatakan bahwa :

"Orang-orang desa seringkali belum siap untuk bekerja di pabrik-pabrik moderen dan tidak dapat disangkal lagi, bahwa sikap tradisional menimbulkan persoalan dalam modernisasi dengan cara berarti yang bermacam-macam". 3)

Berdasarkan kedua formulasi di atas, nampak sangat jelas bahwa masalah utama yang harus diupayakan adalah meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kerja dan sekaligus untuk mengatasi surplus tenaga kerja pada salah satu sektor ekonomi yang ada.

2) Sadono Sukirno., Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan., Medan : Borta Gorat, 1981 halaman 130.

3) Prof. B. Glassburner., Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro., Jakarta : LP 3 ES, 1978. Halaman 169.

Khususnya di Sulawesi Selatan, masalah ketenagakerjaan ini apabila berhasil ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin akan memberikan umpan balik bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu alternatif untuk mengatasi ketidakseimbangan tenaga kerja yang ada, dengan cara mengalihkan ke sektor lainnya; yang menjadi hambatan adalah tentunya bagaimana agar sektor yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin maka sehubungan dengan hal itu, Prof. B. Higgins mengatakan bahwa :

"Mengharuskan mengimport barang-barang modal secara besar-besaran agar sektor moderen dapat dikembangkan dengan laju yang pesat serta dapat menyerap buruh yang berproduktivitas rendah yang banyak sekali yang terkurung pada sektor tradisional". 4)

Dari pendapat di atas nampak terlihat bahwa faktor untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga dengan sendirinya akan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak tersebar di sektor tradisional tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, nampak bahwa adanya beberapa perbedaan yang mendasar, dimana satu pihak menghendaki agar faktor tenaga kerjanya yang perlu diperbaiki, sementara yang lain mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang harus didahulukan. Jadi nampak

4) Loc - cit

bahwa nada optimis oleh para ahli mengenai kependudukan/ ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara berkembang menjadi beralasan, namun terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka khususnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini tetap merasa optimis seperti yang dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro antara lain :

"Persoalan penduduk di Indonesia bukan merupakan ancaman yang tak terhindarkan bagi masyarakat Indonesia, melainkan suatu kesempatan untuk membangun masyarakat baru di seluruh daerah Indonesia. Tetapi apabila kesempatan ini dibiarkan begitu saja, maka hal ini akan membawa akibat-akibat yang tidak diharapkan dan yang kelak akan sukar sekali untuk menghadapinya". 5)

Jadi sekali lagi jelaslah bahwa apa yang dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro di atas adalah merupakan tantangan yang tidak dapat dihindarkan, melainkan kita harus menghadapinya untuk menanggulangi masalah penduduk dan ketenagakerjaan baik oleh Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.

1.6 Kerangka Analisis

Dalam membahas masalah penduduk, tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja ke sektor-sektor ekonomi bagi angkatan kerja yang ada di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1990 - 2005, maka penulis akan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif atas data-data yang

5) Dr. Nathan Keyfitz., Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia., Jakarta : PT Pembangunan, 1964. Hlm. 132

berhasil dikumpulkan. Selanjutnya melalui data-data tersebut akan dihitung persentase tingkat pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan, dan untuk memperkirakan laju kesempatan kerja selama periode tahun yang diamati, maka akan digunakan pendekatan elastisitas kesempatan kerja dengan memperhatikan laju pertumbuhan produksi pada tiap-tiap sektor (Product Domestik Bruto). Asumsi yang penulis gunakan ialah apabila PDB (salah satu sektor) bertambah satu persen, maka kesempatan yang dapat diciptakan oleh sektor tersebut adalah sebesar "x" persen.

Selain itu penulis akan melakukan analisis deskriptif atas hasil penelitian dalam bentuk tabel-tabel yang akan dikemukakan atas seluruh sektor ekonomi yang diteliti. Analisis ini cukup penting walaupun sangat sederhana oleh karena dengan demikian akan dapat diketahui sumbangan masing-masing sektor terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1990 - 2005.



BAB II
METODOLOGI

2.1 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan peralatan analisis berikut ini :

a) $Pt_i = Po_i (1 + r)^n \dots\dots\dots 6)$

dimana,

Pt_i = Jumlah penduduk pada tahun akhir periode

Po_i = Jumlah penduduk pada tahun awal periode

r = Persentase pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun

n = Jumlah tahun yang diamati

b) $\eta_{Ni} = \frac{\sigma_{Li}}{\sigma_{Qi}} \dots\dots\dots 7)$

η_{Ni} = Elastisitas kesempatan kerja pada sektor i

σ_{Li} = Laju kenaikan kesempatan kerja pada sektor i

σ_{Qi} = Laju kenaikan produksi sektor i

6) H. Johannes & Budiono Sri Handoko. Pengantar Matematika Untuk Ekonomi. Jakarta : LP 2 ES, 1981. Hlm. 38

7) Prof. B. Glassburner, Op-Cit. Hlm.164

2.2 Pembatasan Variabel

Agar supaya pembahasan ini tidak keluar dari sasaran yang diinginkan, maka selanjutnya penulis akan membatasi variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini.

- a) Penduduk, adalah komunitas masyarakat yang terdiri dari pria, wanita baik tua maupun muda dan termasuk anak-anak yang ada dalam satu wilayah, misalnya Desa, Kota, Kabupaten ataupun Propinsi, dan seterusnya.
- b) Tenaga Kerja, adalah penduduk yang masuk dalam golongan usia kerja pada suatu wilayah.
- c) Angkatan Kerja, merupakan bagian dari tenaga kerja, baik yang sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan.
- d) Kesempatan Kerja, adalah banyak penduduk yang mampu diserap dalam salah satu sektor ekonomi dalam suatu waktu tertentu.

2.3 Pembatasan Unit Observasi

Batasan-batasan yang akan digunakan sehubungan dalam penelitian ini yaitu perluasan kesempatan kerja pada sektor ekonomi antara lain :

- a) Sektor Pertanian/Kehutanan
- b) Sektor Industri
- c) Sektor Perdagangan
- d) Sektor Pengangkutan/Komunikasi
- e) Sektor Jasa
- f) Sektor Pertambangan/Galian

- g) Sektor Perbankan/Lembaga Keuangan
- h) Sektor Bangunan/Konstruksi
- i) Sektor Listrik, Air, Gas dan Sanitasi
- j) Sektor Pemerintahan
- k) Sektor Sewa Rumah

2.4 Daerah Penelitian

Daerah yang telah penulis tetapkan untuk dijadikan sebagai objek penelitian pada kesempatan ini adalah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan.

2.5 Jenis dan Sumber Data

Guna menunjang pembahasan dalam pembuktian hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi/jawatan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yang berupa laporan-laporan tertulis serta informasi lainnya seperti pada Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Tenaga Kerja Sulawesi Selatan serta Kantor BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan.

2.6 Prosedur Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi dokumenter langsung pada Kantor/Jawatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sejumlah data yang akan ditetapkan berkisar pada :

- Perkembangan penduduk Sulawesi Selatan

- Perkembangan angkatan kerja dan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Selatan
- Perkembangan laju produksi masing-masing sektor ekonomi yang ada

2.7 Tata Urut Isi Laporan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, selanjutnya penulis mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I, adalah merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik/konseptual serta kerangka analisis.

Bab II, adalah metodologi yang terdiri dari hipotesis, metode analisis, pembatasan variabel, pembatasan unit observasi, daerah penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tata urut isi laporan.

Bab III, adalah merupakan Landasan Teoritis yang terdiri dari penduduk serta masalahnya, pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, pasar kerja serta kesempatan kerja.

Bab IV, merupakan selayang pandang Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari tinjauan geografis, demografis serta perkembangan penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja di Sulawesi Selatan.

Bab V, merupakan inti pembahasan dengan mengemukakan kajian terhadap perkembangan penduduk, angkatan kerja dan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan tahun 1990 - 2005.

yang terdiri atas analisis pertumbuhan penduduk, angkatan kerja selama tahun 1990 - 2005, analisis terhadap pertumbuhan produk domestik bruto dan kesempatan kerja, serta analisis terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan.

Bab VI, merupakan simpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

Upaya untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah merupakan problema yang sudah sering terdengar. Problema ini tidak dapat disangkal lagi bahwa perlu segera ditangani secara serius guna mewujudkan sasaran daripada pembangunan nasional yaitu masyarakat sejatara.

Dilandasi oleh suatu persepsi bahwa, tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri, seperti terbatasnya lapangan kerja sehingga akhirnya membawa dampak pada tingginya tingkat persentasi pengangguran yang akan terus meningkat. Selain itu dampak lainnya yang dapat timbul sebagai akibat dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah pada sektor pertanian yang merupakan sumber pencaharian bagi kebanyakan penduduk Indonesia sehingga cara bekerja tidak efisien lagi karena tanah garapan sudah semakin sempit, sehingga tingkat produktivitas masyarakat semakin rendah yang berarti akan turut pula mempengaruhi tingkat pendapatan masing-masing dimana kita ketahui bahwa kebutuhan akan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya adalah merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari.

Seperti kita ketahui bahwa dalam mengatasi masalah penduduk ini Pemerintah telah membentangkan beberapa upaya seperti program transmigrasi, diupayakan untuk penyebaran penduduk yang semakin merata ke seluruh tanah air bumi In-

donesia, sehingga segala potensi sumber daya alam yang ada dapat dikelola semaksimal mungkin secara merata. Selain itu Pemerintah juga mengupayakan program keluarga berencana dimana kita ketahui bahwa sasaran ini adalah untuk membatasi jumlah kelahiran yang pada akhirnya dapat menurunkan laju tingkat pertumbuhan penduduk.

Dengan diterapkannya program nasional tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih layak lagi. Sasaran ini hanya dapat dicapai apabila ada kemauan serta kerja keras baik oleh Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

3.1 Penduduk dan Masalahnya

Teori kependudukan yang sangat terkenal dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834). Adapun teori yang dikemukakan oleh Malthus adalah ketimpangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomi terutama dilihat dari segi kebutuhan pangan, sebab menurut Malthus perkembangan penduduk akan melebihi kecepatan perkembangan ekonomi atau tendensi universal penduduk suatu negara akan bertambah menurut deret ukur, sementara supply tanah dianggap konstan, sedang penyediaan pangan hanya meningkat menurut deret hitung.

Dalam kenyataan, setiap anggota masyarakat hanya memiliki lahan yang terbatas sehingga kontribusi marginal

atas produksi pangan akan semakin menurun, yang disebabkan supply pangan tidak mampu berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

Perkembangan Penduduk Setiap 25 Tahun

Penduduk	1	2	4	8	16	32	64	128	356	712	dst.
Pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst.

Berdasarkan skema di atas nampak bahwa deret-deret pendek menurut Malthus akan terjadi perbandingan antara jumlah penduduk dan penyediaan pangan yang pada mulanya seimbang. Selanjutnya menurut ramalan Malthus, jika pada suatu waktu jumlah produksi pangan bertambah, maka jumlah penduduk akan meningkat pula sehingga setiap orang rata-rata memperoleh pangan yang berkurang lagi dan biasanya yang paling duluan memperoleh pangan sedikit adalah orang-orang yang berpendapatan sedikit.

Beberapa tahun kemudian setelah Malthus membeberkan kekuatirannya tentang perkembangan penduduk dikemudian hari, ternyata mendapat tantangan dari para ahli ekonomi lainnya yang menolak dalil Malthus bahwa : *"Daya reproduksi manusia merupakan sesuatu yang tidak mengalami perubahan (constant magnitude)"*.

Para ahli tersebut antara lain : Doubleday (1790-1870), mengemukakan hukum penduduk untuk tiap kelompok makhluk hidup sebagai berikut : *"Kekurangan bahan makanan*

akan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedang kelebihan pangan justru akan merupakan faktor penghambat perkembangan penduduk".

Herbert Spencer (1820-1903), mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "Makin maju manusia mengembangkan dirinya makin banyak enersi yang diperlukan untuk kemajuan itu dan makin kurang enersi yang tersedia bagi daya untuk reproduksinya. Kemajuan perkembangan manusia ini akan diperoleh terutama dalam bidang kerohanian dan kecerdasan dan bukan dalam pemeliharaan otot-otot dan bidang jasmani".

Apabila ditelaah pendapat dari Doubleday dan Herbert Spencer di atas lebih mengarah pada pertambahan penduduk yang bersifat natura. Sedangkan bila dilihat dari segi sosial ekonomi, maka teori ini berusaha menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat mempengaruhi produksi pangan dan perkembangan penduduk. ✓

Berikut ini akan dikemukakan pula beberapa pelopor dalam pandangan teori sosial ekonomi, antara lain :
Arsene Dumont (1849-1902) dalam bukunya "Depopulation et Civilization" dimana menurut Dumont, ajaran Malthus merupakan suatu kekhilafan. Sedang inti teori yang dikemukakan bahwa dalam masyarakat selalu ada gejala yang disebut "Kapilaritas Social" yang menurut Dumont adalah : "Suatu hasrat manusia untuk memperbaiki sosial ekonominya, dan hasrat itu bersifat turun-temurun".

Konsep pemikiran dari beberapa ahli tersebut di a-

tas dapat disimpulkan bahwa masalah penambahan penduduk dianggap merupakan suatu keadaan yang suram yaitu pada suatu saat penduduk yang bertambah akan kekurangan bahan pangan, namun sebaliknya para ahli lainnya menganggap bahwa dengan adanya kemajuan ekonomi teknologi berarti tingkat penambahan penduduk dapat ditekan sedemikian rupa.

Dengan demikian, maka masalah penambahan penduduk ini tentunya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu :

- a) Perkembangan penduduk yang bersifat mendorong.
- b) Perkembangan penduduk yang bersifat menghambat.

3.1.1 Perkembangan Penduduk Yang Bersifat Mendorong

Suatu bentuk perkembangan penduduk yang bersifat mendorong menurut Sadono Sukirno bahwa :

"Perkembangan penduduk itu memungkinkan penambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Dorongan lain yang timbul terhadap pembangunan ekonomi adalah berupa perluasan pasar. Pertambahan penduduk dapat memungkinkan untuk pengembangan teknologi". 8)

Pendapat di atas dengan jelas memberikan penekanan bahwa dalam menghadapi penambahan penduduk adalah bukan merupakan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan. Perkembangan penduduk memungkinkan untuk menambah jumlah tenaga kerja yang berarti dapat menunjang kegiatan suatu perekonomian dalam suatu negara.

Apabila kita hubungkan dengan keadaan perkembangan

8) Sadono Sukirno. Op.Cit. Hal. 203

penduduk di Indonesia, maka hal-hal yang seringkali dijumpai adalah pertambahan tenaga kerja yang tidak diikuti oleh peningkatan keterampilan dan pendidikan yang memadai menyebabkan tenaga kerja tersebut akan sangat sulit untuk memperoleh lapangan kerja sehingga yang terlihat adalah sebahagian besar penduduk berada pada salah satu sektor ekonomi yang dalam hal ini ialah sektor pertanian.

Pertambahan penduduk dikatakan juga dapat menciptakan perluasan pasar. Kalau kita berbicara tentang pasar, maka yang akan terlihat adanya pembeli dan penjual barang ataupun jasa. Sedangkan perluasan pasar akan ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk suatu daerah, sebab tanpa adanya masyarakat yang mau mengorbankan sebahagian pendapatannya untuk dikonsumsi, maka pasar tidak akan tercipta, demikian juga dilihat dari banyaknya masyarakat itu.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pertambahan penduduk akan diperhadapkan pada peningkatan jumlah tenaga kerja baik yang kurang terampil maupun yang berpendidikan dan mempunyai tingkat keterampilan yang memadai sehingga kemampuan setiap individu untuk mengembangkan daya ciptanya semakin terbuka lebar. Dengan adanya kesempatan untuk mengembangkan kreasinya, maka dapat memberikan kesempatan bagi terciptanya penemuan teknologi baru diberbagai bidang. Namun hal ini bukan berarti perkembangan penduduk hanya ditandai dengan segi positifnya saja, melain-

inkan akan ditemui pula berbagai bentuk hambatan-hambatan lainnya.

3.1.2 Perkembangan Penduduk Yang Bersifat Menghambat

Sebagai akibat buruk yang dapat ditimbulkan akibat perkembangan penduduk, menurut Sadono akan dijumpai beberapa penghambat antara lain :

"... apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah sekali dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran; Perkembangan produksi pertanian yang rendah pula dan akhirnya dalam keadaan penduduk yang berlebihan memberi pengaruh terhadap tingkat tabungan, penanaman modal, distribusi pendapatan, migrasi penduduk dan lain sebagainya". 9)

Lebih lanjut kita dapat melihat beberapa asumsi dasar yang dikemukakan oleh Ricardo yang disunting oleh Drs. Ambar Tadang dalam bukunya Ekonomi Pembangunan (1981) dikemukakan bahwa : *"Law of deminishing returns berlaku pada tanah, supply tanah tetap dan tenaga kerja serta kapital merupakan input variabel"*.

Kedua pendapat di atas yang dikemukakan oleh Sadono dan Ricardo, apabila kita hubungkan dengan keadaan perkembangan penduduk di negara berkembang seperti di Indonesia yang juga sekaligus sebagai negara agraris, maka pertambahan penduduk dalam hal ini sebagai input pada sektor pertanian dengan luas lahan yang tetap, maka lama kelamaan produksi cenderung akan menurun. Dengan semakin banyaknya

9) Loc. Cit

jumlah tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian, maka apabila total produksi sektor tersebut dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada semakin bertambah, produktivitas setiap tenaga kerja akan cenderung menurun pula. Rendahnya tingkat produktivitas masing-masing tenaga kerja tersebut secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan, sehingga untuk menyisihkan sebagian pendapatannya terasa akan sulit terlaksana, sedangkan dalam keadaan yang begini kebutuhan hidup terus menuntut, jadi tidak mengherankan apabila banyak tenaga kerja akan berusaha untuk mencari lapangan kerja di kota-kota besar yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Masalah perkembangan penduduk yang disebut sebagai bersifat pendorong maupun sebagai penghambat, adalah merupakan sesuatu yang wajar, namun penambahan penduduk baik cepat atau lambat adalah sesuatu yang terus berlangsung dan tak dapat dihindari, oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana agar dapat menekan pertumbuhan penduduk tersebut dan mengatasi kelebihan tenaga kerja seperti dengan mengadakan pendidikan kejuruan maupun pendidikan lainnya sehingga keterampilan mereka dapat lebih ditingkatkan. Selama ini para ahli ekonomi belum berhasil menemukan suatu bentuk strategi untuk mengatasi kelebihan penduduk, namun bukan berarti masalah ini harus dihadapi dengan nada yang pesimis, demikian hal ini seperti apa yang dikatakan oleh



Payaman Simanjuntak sebagai berikut :

"Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di Negara itu cukup kuat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakatnya termasuk penyediaan kesempatan kerja". 10)

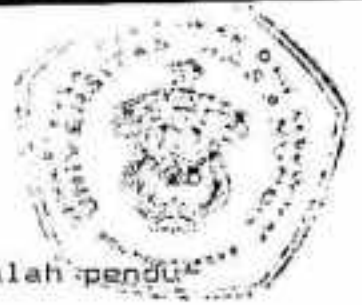
Pendapat yang dikemukakan di atas sangat jelas memperlihatkan bahwa pendekatan yang lebih utama diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan demikian pada suatu saat tertentu masalah kelebihan penduduk bukan merupakan suatu ancaman lagi, melainkan merupakan faktor produksi bagi pertumbuhan ekonomi yang potensial, sebab produk suatu negara ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo sebagai berikut :

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti tercapainya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat terjamin, melainkan diperlukan beberapa proses dalam usaha pencapaian sasaran tersebut". 11)

Pengertian yang dikemukakan oleh Sumitro di atas lebih menekankan pada masalah pertumbuhan penduduk yang dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menanggulangi tekanan penduduk yang terus bertambah tidak

10) Payaman J. Simanjuntak. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985. Hal. 21

11) Sumitro Djojohadikusumo. Masalah Penduduk dan Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Indira, 1973. Hal. 2



mutlak hanya melalui kebijaksanaan terhadap masalah penduduk tersebut. Akhir-akhir ini pada ahli ekonomi kebanyakan lebih menekankan pada aspek penduduk dan kesempatan kerja, dimana usaha ini seakan-akan berupaya untuk mengecilkan arti dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Adalah sesuatu hal yang ironis sekali dimana suatu negara yang masuk kategori negara sedang berkembang melaksanakan pembangunannya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penduduknya sementara usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menduduki posisi sesudahnya. Dalam jangka pendek usaha ini mungkin dapat diterima, namun untuk pembangunan jangka panjang sangat sulit sebab dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, maka secara perlahan tingkat produktivitas setiap tenaga kerja akan cenderung menurun, sedangkan tingkat produktivitas yang rendah mencerminkan tingkat pendapatan yang rendah pula. Jadi untuk mencapai hidup masyarakat yang diinginkan, maka untuk tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk negara tersebut.

3.2 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang lazimnya disebut mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah serta yang sedang mengurus rumah tangga.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting diantara berbagai faktor produksi lainnya

seperti tanah, modal serta teknologi, dan lain sebagainya. Tenaga kerja dikatakan merupakan faktor produksi yang sangat penting sebab, segala proses kegiatan untuk menghasilkan sejumlah produksi, maka hampir seluruhnya dikerjakan oleh tenaga manusia baik secara fisik maupun dengan menggunakan pikiran. Keterlibatan tenaga kerja sebagai pengelola akan mempengaruhi pula tingkat produksi yang dicapai, hal ini tentu saja sangat bergantung pada tingkat keterampilan yang disumbangkan selama proses produksi oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Untuk mengetahui lebih jauh pengertian dari tenaga kerja itu sendiri, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli menyangkut ketenagakerjaan seperti :

"Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". 12)

Definisi diatas mengandung maksud bahwa tenaga kerja tersebut mempunyai hubungan yang positif dengan kegiatan produksi karena sebagai sumber daya atau kekuatan yang dapat mendorong kapasitas produksi.

Definisi lain menyangkut tenaga kerja juga dikemukakan oleh M.M. Papayungan sebagai berikut :

"a) Adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja pada suatu negara, yang

12) S. Gautama. Himpunan Undang-Undang Pokok Republik Indonesia. Undang-Undang No.14 tahun 1969. Bandung : Alumni, 1973. Hal. 156

- dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan dan jika mereka mau untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- b) Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya bekerja atau berusaha untuk bekerja, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.
 - c) Bukan angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak bekerja, dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa". 13)

Dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh lagi maka pendapat diatas, dimana tenaga kerja tersebut sangat tergantung pada permintaan masyarakat dan yang mau menawarkan jasanya untuk kegiatan produksi. Diantara tenaga kerja tersebut, mereka dapat digolongkan sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan sebagian lagi masih digolongkan sedang mencari pekerjaan atau lasimnya disebut penganggur. Dari kedua bentuk golongan tenaga kerja tersebut di atas, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja disebut sebagai angkatan kerja.

Meningkatnya surplus tenaga kerja di Sulawesi Selatan disebabkan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian dan usaha tani lainnya, akibatnya rasio tenaga kerja yang ada dibandingkan dengan luas tanah pertanian

13) M.M. Papayungan. Ekonomi Sumber Daya Manusia. (Diktat I.A bahan kuliah Strata I). Ujung Pandang : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 1984. Hal. 16.

- dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan dan jika mereka mau untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- b) Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya bekerja atau berusaha untuk bekerja, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.
 - c) Bukan angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak bekerja, dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa". 13)

Dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh lagi maka pendapat diatas, dimana tenaga kerja tersebut sangat tergantung pada permintaan masyarakat dan yang mau menawarkan jasanya untuk kegiatan produksi. Diantara tenaga kerja tersebut, mereka dapat digolongkan sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan sebagian lagi masih digolongkan sedang mencari pekerjaan atau lasimnya disebut penganggur. Dari kedua bentuk golongan tenaga kerja tersebut di atas, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja disebut sebagai angkatan kerja.

Meningkatnya surplus tenaga kerja di Sulawesi Selatan disebabkan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian dan usaha tani lainnya, akibatnya rasio tenaga kerja yang ada dibandingkan dengan luas tanah pertanian

13) M.M. Papayungan. Ekonomi Sumber Daya Manusia. (Diktat I.A bahan kuliah Strata I). Ujung Pandang : Fakultas Ekonomi U&niversitas Hasanuddin, 1984. Hal. 16.

sangat tinggi, sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sehingga pertambahan jumlah tenaga kerja dipekerjakan pada luas areal pertanian yang terbatas, menyebabkan produktivitas tenaga kerja tersebut sangat kecil, nol, ataupun negatif. Jenis tenaga kerja semacam ini sering disebut sebagai pengangguran struktural yaitu tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor ekonomi lainnya, disebabkan rendahnya tingkat produktivitas.

Menyangkut masalah surplus tenaga kerja pada sektor ekonomi tertentu, Lewis mengemukakan pendapatnya yang dikutip oleh Sadono Sukirno (1978) sebagai berikut :

"Kelebihan tenaga kerja tersebut merupakan sumber pengangguran tersembunyi yang terutama, yang dapat digunakan di sektor-sektor lain tanpa mengurangi produksi di sektor mana pada mulanya penganggur tersebut berada". 14)

Pendapat Lewis di atas terkandung maksud bahwa tenaga kerja yang surplus pada salah satu sektor ekonomi menyebabkan rendahnya produktivitas pada sektor tersebut yaitu penggunaan input tenaga kerja dalam suatu proses produksi, dibagi dengan banyaknya output yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut. Sebagai contoh, dimana tadi-nya sebidang tanah dikerjakan oleh dua orang, setelah penambahan jumlah tenaga menjadi empat orang, maka produksi tersebut tidak akan bertambah secara berarti, yang oleh Lewis disebut sebagai tenaga pengangguran tersembunyi.

14) Sadono Sukirno. Op-Cit. Hal. 129

3.3 Pengertian Angkatan kerja

Angkatan kerja (labour force) dapat didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang bekerja, tidak bekerja tapi mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk berumur 10 tahun ke atas masih dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja.

Menurut Payaman Simanjutak bahwa yang dimaksud dengan kategori bukan angkatan kerja adalah :

- a) Golongan yang bersekolah
- b) Golongan yang mengurus rumah tangga
- c) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan". 15)

Pengertian yang dikemukakan oleh Payaman di atas memberikan pengertian bahwa golongan yang bersekolah, adalah yang benar-benar hanya bersekolah tanpa melakukan kegiatan ekonomi, begitupun dengan yang mengurus rumah tangga tanpa menerima upah dari sumber lainnya, selain hanya mengurus rumah tangga, serta para pensiunan cacat jasmani yang sama sekali tidak dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya.

Pengertian menyangkut tentang angkatan kerja lainnya dikemukakan pula oleh Winardi sebagai berikut :

"Jumlah total penduduk yang benar-benar berada pada pasar tenaga kerja pada saat tertentu. Definisi sensus ini mencakup mereka yang bekerja, mereka yang mempunyai jabatan pada pekerjaan-pekerjaan

15) Payaman J. Simanjutak, Op-Cit., Hal. 6

darurat, pemerintah, dan mereka yang mencari pekerjaan secara aktif. Jadi tidak termasuk di dalamnya mereka yang dapat dan bersedia bekerja, tetapi yang tidak bekerja dan yang tidak berusaha untuk mencari pekerjaan". 16)

Pendapat yang dikemukakan oleh Winardi di atas memberikan penekanan bahwa pada dasarnya tidak jauh berbeda seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Payaman dimana pada pokok pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas dan berada pada pasar tenaga kerja pada saat tertentu.

Seseorang yang berada dalam pasar tenaga kerja berarti menawarkan jasanya untuk kegiatan produktif, apakah dia sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Besarnya penempatan jumlah orang yang bekerja dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah.

Permintaan akan tenaga kerja itu datangnya dari para pengusaha atau produsen. Upah yang dibayarkan oleh para pengusaha tersebut merupakan salah satu atau bagian dari biaya produksi. Oleh karena itu pengusaha dalam taksiran subjektif dari sejumlah uang yang akan dibayarkan sebagai upah, dengan mengingat akan harga yang diterima sebagai hasil akhir dari produksinya. Hasil produksi ini timbul sebagai akibat dari kerja sama antara faktor-faktor pro-

16) Winardi. Kamus Ekonomi, Bandung : Alumni, 1977
Hal. 199.

duksi yaitu modal dan tenaga kerja, dimana masing-masing memberikan sumbangan produktifnya. Jadi pada dasarnya untuk menetapkan upah itu adalah berdasarkan produktivitas kerja itu sendiri.

Pasar kerja adalah merupakan mekanisme mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Proses ini memerlukan waktu yang lama karena tenaga kerja maupun lowongan kerja tidak homogen. Pengertian pasar kerja lebih jauh di kemukakan oleh Payaman sebagai berikut :

"Seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja". 17)

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaku-pelaku tersebut terdiri dari : pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, pencari kerja dan perantara yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk bertemu. Usaha untuk mempertemukan dalam hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah ataupun Badan Usaha swasta lainnya.

Pengertian yang diformulasikan oleh Payaman memberikan pengertian bahwa perlunya perantara untuk mempertemukan pengusaha dan pencari kerja disebabkan para pencari kerja tidak mempunyai tingkat pendidikan ataupun tingkat keterampilan yang sama, dipihak lain sebagai pengusaha memerlukan pekerja yang mampu mengisi lowongan yang tersedia sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan masing-masing pencari kerja. Oleh karena itu tidak semua pencari

17) Payaman J. *Simanjutak; Dg-Cit*, hlm. 86

penawaran dan permintaan tenaga kerja. Perbedaan tersebut sering kali dijumpai, disebabkan oleh karena umur, tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja dan lain-lain. Perbedaan tersebut menyebabkan sulitnya untuk bertemu dengan kesempatan kerja yang ada.

3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Penyediaan tenaga kerja yang terbatas sifatnya disebabkan karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, melainkan penduduk yang telah mencapai usia minimum baru dapat dikatakan sebagai angkatan kerja. Untuk Indonesia digunakan batasan umum 10 - 64 tahun, namun dari batasan umur tersebut tidak semua termasuk golongan tenaga kerja atau termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu Negara atau Daerah pada waktu tertentu yaitu :

"perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja". 18)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, tidak semua penduduk usia kerja dapat digolongkan kedalam angkatan kerja. Dengan demikian, maka secara umum tingkat partisipasi kerja dapat dinyatakan dalam suatu kelompok tertentu, misalnya menurut kelompok umur, kelompok pria atau wanita dan lain-lain, sehingga untuk mengetahui berapa besar tingkat partisipasi kerja secara umum menurut Payaman

18) Zainab Bakir & Chris Manning (editor); Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta : CV. Rajawali, 1984. Hal. 29.

J. Simanjuntak dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{TPK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \% \quad \dots 19)$$

Dengan cara perhitungan tersebut di atas, sudah tentu kita dapat menghitung tingkat partisipasi kerja penduduk menurut jenis kelamin misalnya untuk angkatan kerja wanita, maka jumlah angkatan kerja wanita pada suatu daerah atau pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja wanita pada suatu daerah atau tahun yang sama sehingga dengan perhitungan ini, maka besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada saat tertentu dapat diketahui begitupun jenis kelompok lainnya.

Besar kecilnya tingkat partisipasi kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah penduduk usia kerja yang bersekolah, dimana semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, maka jumlah angkatan kerja semakin sedikit yang berarti tingkat partisipasi kerja akan kecil pula, demikian juga sebaliknya. Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi kerja adalah umur, upah, tingkat pendidikan dan sebagainya. Untuk tingkat pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk memperoleh pekerjaan semakin besar dengan kata lain tingkat partisipasi kerja akan semakin besar pula.

19) Payaman J. Simanjuntak; Op.Cit. Hal. 36

Setelah kita mengetahui perhitungan tingkat partisipasi kerja, maka ada baiknya kalau kita mengetahui juga cara perhitungan tingkat pengangguran. Sebelum membahas lebih lanjut, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian daripada pengangguran itu sendiri, dimana menurut Michael P. Todaro antara lain :

- "a) *Setengah pengangguran (underemployment) yaitu mereka yang secara nominal bekerja penuh (full-time), namun produktivitasnya begitu rendah sehingga pengurangan dalam jam kerja tidak mempunyai pengaruh yang berarti atas produksi secara keseluruhan.*
- b) *Pengangguran terbuka (open unemployment) yaitu mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja, tetapi tidak tersedia lapangan kerja yang cocok bagi mereka". 20)*

Dalam memberikan batasan tentang pengangguran dan yang bukan penganggur masih sangat kabur oleh karena adanya batas penentu jam bekerja yang berbeda-beda, orang yang bekerja pada dasarnya hanya ingin memperoleh penghasilan sehingga orang yang bekerja dan menganggur tidak menunjukkan apa-apa mengenai tingkat pendapatan dan tingkat produktivitas seseorang. Oleh karena terbatasnya data mengenai jumlah jam kerja tiap orang, maka besarnya tingkat pengangguran dapat dihitung secara umum yaitu :

$$\text{Tingkat Pengangguran} : \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$$

20) Michael P. Todaro; Op.Cit. Hal. 161

Pengertian pengangguran lainnya dikemukakan pula oleh Gardner Ackley sebagai berikut :

- a) *Penduduk di atas usia 14 tahun tidak menjadi anggota suatu lembaga ataupun dalam angkatan bersenjata.*
- b) *Tidak digolongkan sebagai orang yang bekerja.*
- c) *Secara aktif sedang mencari pekerjaan ataupun tidak mencari pekerjaan, disebabkan karena sudah dipecat, sakit untuk sementara, atau percaya tidak tersedia tugas baru pada lapangan kerja pada lapangan kerja yang sesuai dengan pekerjaannya." 21)*

3.5 Kesempatan Kerja

Pengertian kesempatan kerja lasimnya dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja pada suatu waktu tertentu ataupun pada tempat tertentu. Namun kesempatan kerja bukanlah merupakan lapangan kerja, walaupun pada dasarnya untuk mencapai sasaran tersebut dimasa mendatang adalah untuk meluaskan kesempatan kerja bagi sebagian penduduk. Lebih jauh dapat dilihat pengertian kesempatan kerja yang dikemukakan oleh Sudarsono, antara lain :

"Kesempatan kerja menggambarkan besarnya rumah tangga perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi". 22)

Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarsono di atas pada dasarnya mencakup ruang lingkup suatu perusahaan atau

21) Gardner Ackley: Teori Ekonomi Makro. (terjemahan) Jakarta : U.I. Press, Jakarta, 1983. Hal. 121

22) Sudarsono. Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta : LP3ES, 1983. Hal. 324

secara mikro. Pengertian kesempatan kerja lainnya dikemukakan oleh Soediyono sebagai berikut :

"Perekonomian dimana semua kapasitasnya ada dalam penggunaan penuh dikatakan bahwa perekonomian tersebut ada dalam keadaan full-employment. Sedangkan perekonomian dimana ada sebagian kapasitas produksinya tidak terpakai disebut keadaan under-employment". 23)

Pengertian yang dikemukakan oleh Soediyono di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa besar kecilnya tingkat kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh produksi suatu Negara atau tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi apabila peningkatan produksi Nasional lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk daerah tersebut. Namun bukan berarti dapat memberikan jaminan bagi terciptanya kesempatan kerja yang tinggi. Oleh karena itu untuk menjaga agar tingkat kesempatan kerja berada pada posisi yang diinginkan, maka penyediaan lapangan kerja perlu diarahkan pada penciptaan lapangan yang bersifat padat karya sambil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil agar pertambahan penduduk yang tinggi dapat diawasi walaupun tidak secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pendapat Rudolf H. Strahm :

"Teknologi tepat guna merupakan bentuk yang paling tepat bagi negara-negara sedang berkembang, bukan bentuk produksi tradisional maupun teknologi moderen yang padat modal. Teknologi tepat guna lebih produktif daripada teknologi tradisional, tetapi lebih sedikit memerlukan modal apabila dibanding-

23) Soediyono R. Ekonomi Makro, Pengantar Analisa Pendapatan Nasional. Yogyakarta : Liberty, 1981. Hal. 52.

kan dengan teknologi yang moderen". 24)

Formulasi yang dikemukakan oleh Rudolf tersebut di atas memberikan pengertian bahwa, kebijaksanaan umum diarahkan pada penciptaan iklim sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat terwujud. Kebijaksanaan di sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan produksinya agar diarahkan pada upaya penciptaan produksi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

24) Rudolf H. Strahm; Yang Berlimpah dan Yang Mera-
na. Jakarta : PT. Gramedia, 1983. Hal. 109.

BAB IV
SELAYANG PANDANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

4.1 Tinjauan Geografis

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah salah satu propinsi di wilayah Indonesia bagian timur yang sekaligus merupakan pintu gerbang menuju kota-kota besar lainnya, dengan Ibukota Propinsi Ujung Pandang.

Sulawesi Selatan terletak diantara $0^{\circ} 12'$ Lintang Utara dan 8° Lintang Selatan dan diantara $116^{\circ} 48'$ - $122^{\circ} 36'$ Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Selatan : dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : dengan Selat Makassar

Luas wilayah sebesar $62.482,54 \text{ Km}^2$ atau kurang lebih 42 % dari luas Pulau Sulawesi dan 4,1 % dari luas seluruh kepulauan Indonesia.

4.2 Tinjauan Demografi

Pada sub bab ini penulis akan membagi ke dalam tiga bagian pembahasan yaitu jumlah dan perkembangan penduduk Sulawesi Selatan, dan tingkat pendidikan masing-masing se-



bagai berikut :

4.2.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Sulawesi Selatan

Keadaan penduduk Sulawesi Selatan sesuai dengan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 6.980.589 jiwa, sedangkan pada tahun 1980 jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 6.057.561 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,43 % per tahun.

Apabila jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 1990 tersebut dibagi dengan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka akan terlihat rata-rata kepadatan penduduk Sulawesi Selatan dalam 1 Km² sebanyak 111 jiwa. Dari kepadatan penduduk Sulawesi Selatan Saat ini masih belum dikatakan sebagai ancaman sebab nampak lahan yang dapat digarap masih cukup besar.

Dari angka pertumbuhan penduduk di atas selanjutnya akan dilihat komposisi penduduk Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 sebagai berikut :

Penduduk Laki-Laki	3.409.989 jiwa	48,85 %
Penduduk Perempuan	3.570.600 jiwa	51,15 %
Total Penduduk	6.980.589 jiwa	100,00 %

Berdasarkan perbandingan komposisi penduduk Perempuan dan Laki-Laki di atas nampak bahwa penduduk Perempuan lebih banyak dengan persentasi 51,15 % penduduk Perempuan dan 48,85 % penduduk Laki-Laki atau terdapat selisih sebesar 160.611 jiwa.

Apabila dilihat struktur penduduk Sulawesi Selatan yang berjumlah 6.980.989 jiwa, maka sesuai data statistik diketahui bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk yang bermukim di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dapat dilihat sebagai berikut :

Penduduk pedesaan	5.268.331 jiwa	75,47 %
Penduduk perkotaan	1.712.258 jiwa	24,53 %
Total Penduduk	6.980.589 jiwa	100,00 %

Dari perbandingan di atas nampak bahwa penduduk yang tinggal di daerah pedesaan adalah sebesar 5.268.331 jiwa atau sebesar 75,47 % dan selebihnya yang bertempat tinggal di perkotaan adalah sebesar 1.712.258 jiwa atau sebesar 24,53 %

Seperti telah diketahui bahwa penduduk/masyarakat yang bermukim di daerah pedesaan sebagian besar hidupnya dari bercocok tanam atau bertani lainnya.

4.2.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan kepribadian baik di sekolah maupun di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah pada pokoknya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang berarti akan dapat pula meningkatkan taraf hidup dalam arti yang luas.

Jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat

atas dan jenjang universitas atau pendidikan tinggi.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang berusia sekolah yaitu usia antara 7 sampai 18 tahun yang sedang melakukan / mengikuti program pendidikan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Murid Berdasarkan Usia Sekolah Pada Tahun 1990

Tingkat Pendidikan	Jumlah Murid
Sekolah dasar	1.094.799
S.L. Tingkat Pertama	265.588
S.L. Tingkat Atas	140.266
S.L. Kejuruan	48.941
Jumlah	1.598.535

Sumber : Kantor Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa jumlah murid terbanyak pada tingkat Sekolah Dasar, hal ini disebabkan karena Pemerintah senantiasa berusaha untuk menghilangkan atau membebaskan penduduk dari buta huruf.

4.3 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan

Sejalan dengan adanya pertambahan penduduk di Sulawesi Selatan, maka akan mempengaruhi keadaan angkatan kerja yang juga turut meningkat jumlahnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2. Perkembangan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 1980 - 1990

T a h u n	Jml. Angk. Kerja (orang)	pDt
1 9 8 0	1.821.038	-
1 9 8 1	1.852.541	1,7
1 9 8 2	1.884.589	1,7
1 9 8 3	1.917.192	1,7
1 9 8 4	1.942.500	1,3
1 9 8 5	1.971.737	1,5
1 9 8 6	2.013.143	2,1
1 9 8 7	2.055.419	2,1
1 9 8 8	2.098.582	2,1
1 9 8 9	2.142.652	2,1
1 9 9 0	2.186.557	2,0

Sumber : Kantor Wilayah Dep. Tenaga Kerja Sulawesi Selatan.

Berdasarkan persentasi peningkatan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan selama tahun 1980 sampai tahun 1990, maka diperoleh rata-rata peningkatan 1,8 % setiap tahunnya.

Setelah kita melihat perkembangan angkatan kerja, maka berikut ini akan dilihat pula perkembangan jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan untuk tahun yang sama.

Tingkat perkembangan tenaga kerja di Sulawesi Selatan, tidak berbeda jauh dengan keadaan angkatan kerja yang ada. Masalah yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan adalah perkembangan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertambahan tenaga kerja ataupun sebaliknya, lapangan kerja yang ada seringkali tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

Untuk lebih jelasnya, perkembangan tenaga kerja di Sulawesi Selatan selama tahun 1980 sampai 1990 dapat dili-

hat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perkembangan Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan Tahun 1980 - 1990

T a h u n	Jml. Tenaga Kerja (orang)	pCt
1 9 8 0	4.206.494	
1 9 8 1	4.288.541	1,95
1 9 8 2	4.295.162	0,15
1 9 8 3	4.347.988	1,22
1 9 8 4	4.397.591	1,14
1 9 8 5	4.584.063	4,24
1 9 8 6	4.663.825	1,74
1 9 8 7	4.744.976	1,74
1 9 8 8	4.827.538	1,74
1 9 8 9	4.885.026	1,74
1 9 9 0	4.976.253	1,87

Sumber : Kantor Wilayah Dep. Tenaga Kerja Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan tenaga kerja selama tahun 1980 - 1990 mencapai rata-rata 1,7 % setiap tahun. Sedangkan pertumbuhan angkatan kerja selama periode yang sama rata-rata 1,8 % per tahun.

BAB V

KAJIAN ATAS PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

5.1 Analisis Terhadap Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Selama Tahun 1990 - 2005

Berbicara masalah angkatan kerja dan tenaga kerja, maka kita tidak dapat terlepas dari masalah penduduk itu sendiri, oleh karena itu tidak ada salahnya apabila kita menghitung seberapa besar tingkat pertumbuhan penduduk sebelum dibahas pokok permasalahan yang ada.

Sesuai data statistik, maka penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 1985 sebesar 6.407.720 jiwa dan pada tahun 1990 naik menjadi 6.980.989 jiwa yang berarti telah terjadi peningkatan sebesar 573.269 jiwa, sehingga untuk menghitung rata-rata pertumbuhan per tahun adalah :

$$P_{t_i} = P_{o_i} (1 + r)^5$$

$$6.980.989 = 6.407.720 (1 + r)^5$$

$$\text{Log } 6.980.989 = \text{Log } 6.407.720 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$6,84391 = 6,80670 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$0,03721 = 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$\text{Log } (1 + r) = 0,00744$$

$$1 + r = 1,01728$$

$$r = 0,01728$$

$$\text{atau, } r = 1,73 \%$$

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan rata-rata per tahun selama tahun 1985 - 1990 adalah sebesar 1,73 %, dengan demikian, maka untuk memperkirakan pertumbuhan angkatan kerja dan tenaga kerja dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang sama.

Jumlah angkatan kerja Sulawesi Selatan pada tahun 1985 sebesar 1.971.737 jiwa dan pada tahun 1990 jumlah meningkat menjadi 2.186.557 jiwa, sehingga rata-rata pertumbuhan pertahun adalah :

$$2.186.557 = 1.971.737 (1 + r)^5$$

$$\text{Log } 2.186.557 = \text{Log } 1.971.737 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$6,33976 = 6,29485 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$0,04491 = 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$\text{Log } (1 + r) = 0,00898$$

$$1 + r = 1,02089$$

$$r = 0,02089$$

$$\text{atau, } r = 2,09 \%$$

Jumlah Tenaga Kerja Sulawesi Selatan pada tahun 1985 sebesar 4.584.063 jiwa dan pada tahun 1990 jumlah meningkat menjadi 4.976.253 jiwa, sehingga rata-rata pertumbuhan pertahun adalah :

$$4.976.253 = 4.584.063 (1 + r)^5$$

$$\text{Log } 4.976.253 = \text{Log } 4.584.063 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$6,69690 = 6,66125 + 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$0,03565 = 5 \text{ Log } (1 + r)$$

$$\text{Log} (1 + r) = 0,00713$$

$$1 + r = 1,01655$$

$$r = 0,01655$$

$$\text{atau } r = 1,66 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh bahwa laju pertumbuhan rata-rata pertahun angkatan kerja adalah sebesar 2,09 % dan untuk tenaga kerja sebesar 1,66 % sehingga diperkirakan jumlah penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

(dengan menggunakan rumus)

$$P_0 (1 + r)^n$$

dimana : P_0 = tahun dasar pengamatan

r = persentase pertumbuhan / tahun

n = jumlah tahun yang diamati

1) Penduduk

$$6.407.720 (1 + r)^{20}$$

$$6.407.720 (1 + 0,01728)^{20}$$

$$6.407.720 (1,01728)^{20}$$

$$6.407.720 (1,40867) = 9.026.363 \text{ jiwa}$$

2) Tenaga Kerja

$$4.584.063 (1 + r)^{20}$$

$$4.584.063 (1 + 0,01655)^{20}$$

$$4.584.063 (1,01655)^{20}$$

$$4.584.063 (1,38859) = 6.365.384 \text{ jiwa}$$

3) Angkatan Kerja

$$1.971.737 (1 + r)^{20}$$

$$1.971.737 (1 + 0,02089)^{20}$$

$$1.971.737 (1,02089)^{20}$$

$$1.971.737 (1,51209) = 2.981.444 \text{ jiwa}$$

Dari hasil perhitungan di atas nampak, bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk Sulawesi Selatan diperkirakan akan mencapai 9.026.363 jiwa yang berarti naik sebesar 2.618.643 jiwa atau 40,87 %, dan tenaga kerja naik sebesar 1.781.321 jiwa atau 38,86 % sedangkan angkatan kerja naik sebesar 1.009.707 jiwa atau 51,21 %.

Kenaikan tertinggi dicapai oleh angkatan kerja yaitu sebesar 51,21 % disusul oleh penduduk yakni sebesar 40,87 % dan terakhir tenaga kerja sebesar 38,86 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel ... Perkiraan Penduduk, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan 1985 - 2005

U R A I A N	1985	1990	2005
Penduduk	6.407.720	6.980.989	9.026.363
Tenaga Kerja	4.584.063	4.976.253	6.365.384
Angkatan Kerja	1.971.737	2.186.557	2.981.444

Sumber : Kanwil Depnaker Sulsel
data telah diolah

5.2 Tingkat Partisipasi Kerja

Setelah diketahui laju pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja di Sulawesi Selatan, maka selanjutnya akan dihitung besarnya tingkat partisipasi kerja periode tahun 1990 - 2005.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk memperoleh besarnya tingkat partisipasi kerja (T.P.K.), maka jumlah angkatan kerja pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama, atau dengan rumus sebagai berikut :

$$T.P.K. = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$$

Adapun hasil perhitungan tingkat partisipasi kerja di Sulawesi Selatan dan proyeksi untuk tahun 2005 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel ... Tingkat Partisipasi Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 1985 - 2005

U R A I A N	1985	1990	2005
Angkatan Kerja	1.971.737	2.186.557	2.981.444
Tenaga Kerja	4.584.063	4.976.253	6.365.384
T.P.K.	43,01 %	43,94 %	46,84 %

Sumber : Kanwil Depnaker Sulsel data telah diolah

Pada tabel di atas nampak bahwa tingkat partisipasi



kerja pada tahun 1985 sebesar 43,01 % mengalami peningkatan pada tahun 1990 sebesar 43,94 % dan untuk proyeksi pada tahun 2005 naik mencapai 46,84 %

5.3 Analisis Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kesempatan Kerja

5.3.1 Perkembangan PDRB di Sulawesi Selatan

Perkembangan ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan apabila diukur dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama tahun 1985 - 1989 adalah sebagai berikut :

Tabel .. Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan Tahun 1985 - 1989

T a h u n	P.D.R.B.	Naik (Turun)	pCt
1 9 8 5	2.068.206.520,-	-	-
1 9 8 6	2.589.320.140,-	521.113.620,-	25,20
1 9 8 7	2.870.427.470,-	281.107.330,-	9,79
1 9 8 8	3.299.283.480,-	428.856.010,-	14,94
1 9 8 9	3.735.668.120,-	436.384.640,-	11,68

Sumber : Kantor Bappeda Sulsel
Data Telah Diolah

Pada tabel di atas nampak bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku tahun 1985 - 1989 menunjukkan kenaikan kuantitas secara terus menerus, namun apabila dilihat dari prosentase

si kenaikan, maka nampak dengan jelas memperlihatkan penurunan, walaupun jumlah PDRB tetap meningkat.

PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 1985/86 mengalami peningkatan sebesar Rp 521.113.620,- atau mengalami kenaikan sebesar 25,2 % dan pada tahun 1986/87 meningkat sebesar Rp 281.107.330,- atau sebesar 9,79 % dan selanjutnya pada tahun 1987/88 meningkat sebesar Rp 428.856.010,- atau sebesar 14,94 % dan pada tahun 1988/89 mengalami peningkatan sebesar Rp 436.384.640,- atau sebesar 11,68 %.

5.3.2 Pergeseran dan Komposisi Sektoral

Pergeseran dan komposisi sektoral Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan selama tahun 1987 sampai tahun 1989 menurut harga konstan tahun 1983, lebih jelasnya dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut :

Produk Domestik Regional Bruto
di Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Konstan 1983, Tahun 1987 - 1989

Lapangan Usaha	(Rp Juta)		
	1987	1988	1989
Pertanian (pCt)	919.007.11 42.42	1,026,996.53 43.46	1,096,358.37 43.81
Pertambangan (pCt)	17.906.55 0.83	18,699.70 0.79	19,863.22 0.79
Industri (pCt)	133,067.83 6.14	149,578.04 6.33	164,414.64 6.57
Listrik, Gas dan Air (pCt)	24,897.66 1.15	27,638.34 1.17	31,062.39 1.24
Konstruksi (pCt)	84,231.81 3.89	91,399.55 3.87	99,488.18 3.98
Perdagangan (pCt)	394,089.75 18.19	419,360.75 17.75	427,295.54 17.07
Transportasi (pCt)	209,093.55 9.65	223,038.56 9.44	236,224.58 9.44
Bank dan Lembaga Keu. (pCt)	142,776.13 6.59	150,172.78 6.35	159,330.02 6.37
Pemerintahan dan Jasa (pCt)	241,215.52 11.13	256,284.13 10.84	268,483.45 10.73
J u m l a h	2,166,285.91	2,363,168.38	2,502,520.39

Sumber : Kantor Statisti Sulawesi Selatan
Data Telah diolah

Produk Domestik Regional Bruto
di Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1987 - 1989

Lapangan Usaha	(Rp Juta)		
	1987	1988	1989
Pertanian (pCt)	1,226,137.91 42.72	1,440,466.42 43.66	1,629,818.91 43.63
Pertambangan (pCt)	24,846.57 0.87	27,387.61 0.83	30,848.53 0.83
Industri (pCt)	168,476.63 5.87	207,584.71 6.29	245,856.53 6.58
Listrik, Gas dan Air (pCt)	34,453.18 1.20	39,477.34 1.20	46,081.06 1.23
Konstruksi (pCt)	105,188.69 3.66	120,738.82 3.66	140,258.43 3.75
Perdagangan (pCt)	567,588.18 19.77	632,044.47 19.16	717,335.85 19.20
Transportasi (pCt)	248,407.78 8.65	279,974.96 8.49	314,100.59 8.41
Bank dan Lembaga Keu. (pCt)	182,411.88 6.35	199,811.30 6.06	223,135.98 5.97
Pemerintahan dan Jasa (pCt)	312,919.65 10.90	351,797.86 10.66	388,232.24 10.39
J u m l a h	2,870,430.47	3,299,283.49	3,735,668.12

Sumber : Kantor Statisti Sulawesi Selatan
Data Telah diolah

Pada tabel tersebut di atas menjelaskan tentang perkembangan PDRB di Sulawesi Selatan tahun 1987 - 1989 atas harga berlaku dan konstan tahun 1983. Perkembangan PDRB secara sektoral menunjukkan sebagai berikut :

a) Sektor Pertanian,

Tahun 1987 : 42,42 %

Tahun 1989 : 43,81 %

Keadaan ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, masih merupakan penyumbang terbesar. Ini dapat dilihat dari komposisi jumlah yang meningkat sekalipun prosentasi mengalami penurunan.

b) Sektor Pertambangan,

Tahun 1987 : 0,83 %

Tahun 1989 : 0,79 %

Keadaan ini menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan mengalami peningkatan namun dalam bentuk prosentasi nampak mengalami penurunan.

c) Sektor Industri,

Tahun 1987 : 6,14 %

Tahun 1989 : 6,57 %

Perkembangan Sektor Industri apabila dilihat dari komposisi maupun prosentase terhadap PDRB Sulawesi Selatan nampak mengalami peningkatan. Disini nampak sekali bahwa secara perlahan perubahan struktur ekonomi pertanian bergeser ke ekonomi industri.

d) Sektor Listrik Gas dan Air,

Tahun 1987 : 1,15 %

Tahun 1989 : 1,24 %

Perkembangan Sektor Listrik, Gas dan Air apabila dilihat dari komposisi maupun prosentase terhadap PDRB Sulawesi Selatan nampak mengalami peningkatan.

e) Sektor Konstruksi,

Tahun 1987 : 3,89 %

Tahun 1989 : 3,98 %

Demikian pula perkembangan Sektor Konstruksi apabila dilihat dari komposisi maupun prosentase terhadap PDRB Sulawesi Selatan juga nampak mengalami peningkatan.

f) Sektor Perdagangan,

Tahun 1987 : 18,19 %

Tahun 1989 : 17,07 %

Perkembangan Sektor Perdagangan apabila dilihat dari komposisi menunjukkan peningkatan, namun dalam bentuk prosentasi sebaliknya mengalami penurunan.

g) Sektor Transportasi,

Tahun 1987 : 9,65 %

Tahun 1989 : 9,44 %

Perkembangan Sektor Transportasi apabila dilihat dari komposisi menunjukkan peningkatan, namun dalam bentuk prosentasi sebaliknya mengalami penurunan.

h) Sektor Lembaga Keuangan,

Tahun 1987 : 6,59 %

Tahun 1989 : 6,37 %

Perkembangan Sektor Bank dan Lembaga Keuangan ini apabila dilihat dari komposisi menunjukkan peningkatan, namun dalam bentuk prosentasi sebaliknya mengalami penurunan.

i) Sektor Pemerintahan dan Jasa,

Tahun 1987 : 11,13 %

Tahun 1989 : 10,73 %

Demikian pula terhadap perkembangan Sektor Pemerintahan dan Jasa ini apabila dilihat dari komposisi menunjukkan peningkatan, namun dalam bentuk prosentasi sebaliknya mengalami penurunan.

Seluruh sektoral yang ada di Sulawesi Selatan, perkembangan komposisi prosentasi mengalami naik turun, namun komposisi jumlah, menunjukkan peningkatan.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB Sulawesi Selatan yang terbesar adalah Sektor Pertanian, disusul kemudian oleh Sektor Perdagangan, Sektor Pemerintah dan Jasa, Sektor Transportasi, Sektor Lembaga Keuangan, Sektor Industri, Sektor Konstruksi, Sektor Listrik, Gas dan Air dan terakhir adalah Sektor Pertambangan.

5.4 Analisis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan Tahun 1990 - 2005

Untuk mengetahui berapa besar kesempatan kerja yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi, terlebih da-

hulu akan dihitung elastisitas kesempatan kerja berdasarkan laju pertumbuhan kesempatan kerja dibagi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pengertian ini telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Untuk mengetahui elastisitas kesempatan kerja di Sulawesi Selatan selama tahun 1987 sampai tahun 1989, maka berdasarkan data yang diperoleh bahwa laju pertumbuhan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan sebesar 6,94 %, sedangkan laju pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan pada periode tahun yang sama sebesar 8,62 %. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat diketahui elastisitas kesempatan kerja secara keseluruhan yaitu :

$$\text{Elastisitas (E)} = \frac{6,94}{8,62} = 0,805$$

demikian pula untuk menghitung masing-masing sektor ekonomi di Sulawesi Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.

ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA
MENURUT SEKTOR EKONOMI
DI SULAWESI SELATAN

Sektor Ekonomi	1 9 8 7		1 9 8 9		Pertumbuhan/Thn		Elasti- sitas
	PDRB.	K.K.	PDRB	K.K.	PDRB	K.K.	
Pertanian	919,007.11	1,427,308	1,096,358.37	1,653,496	9,22	7,63	0,828
Pertambangan	17,906.55	2,346	19,863.22	2,650	8,07	6,28	0,778
Industri	133,067.83	348,533	164,414.64	382,948	11,16	4,82	0,432
Listrik, Gas & Air	24,897.66	1,055	31,062.39	1,356	11,71	13,37	1,142
Konstruksi	84,231.81	32,560	99,488.18	34,852	8,68	3,46	0,399
Perdagangan	349,089.75	336,423	427,295.54	383,187	10,64	6,72	0,632
Transportasi	209,093.55	60,119	236,224.58	63,210	6,29	2,54	0,404
Bank & Lembaga Keu.	142,776.13	9,124	159,330.02	11,258	5,64	11,08	1,965
Pemerintahan & Jasa	241,215.52	308,851	268,483.45	356,223	5,50	7,40	1,345
T o t a l	2,121,285.91	2,526,319.00	2,502,520.39	2,889,180.00	8,62	6,94	0,805

Sumber : Kantor BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan
KANWIL Tenaga Kerja Sulawesi Selatan
Data Telah Diolah

Penjelasan menyangkut elastisitas kesempatan kerja menurut sektor ekonomi di Sulawesi Selatan adalah :

1. Sektor Pertanian

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,828

2. Sektor Pertambangan

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertambangan akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,778

3. Sektor Industri

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Industri akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,432

4. Sektor Listrik, Gas dan Air

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Listrik, Gas dan Air akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 1,142

5. Sektor Konstruksi

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Konstruksi akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,399

6. Sektor Perdagangan

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perdagangan akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,632

7. Sektor Transportasi

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Transportasi akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,404

8. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Bank dan Lembaga Keuangan akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 1,965

9. Sektor Pemerintahan dan Jasa

Setiap perubahan penambahan satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pemerintahan dan Jasa akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 1,345

Setelah ditetapkan besarnya elastisitas kesempatan kerja untuk masing-masing sektor di Sulawesi Selatan, selanjutnya akan dihitung pula perkiraan besarnya tenaga kerja yang dapat diserap ke berbagai sektor ekonomi periode tahun 1989 sampai tahun 2005 dengan menggunakan asumsi bahwa elastisitas kesempatan kerja tidak berubah dan sasaran pertumbuhan PDB masing-masing sektor pada Repelita V adalah sebagai berikut :

- Sektor Pertanian	5,30 %
- Sektor Pertambangan	6,60 %
- Sektor Industri	12,70 %
- Sektor Listrik, Gas dan Air	9,20 %
- Sektor Konstruksi	10,20 %
- Sektor Perdagangan	9,30 %

- Sektor Transportasi 12,10 %
- Sektor Lembaga Keuangan 10,40 %
- Sektor Pemerintahan & Jasa 9,40 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 10 .

PROYEKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA
MENURUT SEKTOR EKONOMI
DI SULAWESI SELATAN

Sektor Ekonomi	1987	o Q (%)	n N	o L	o 16 (1+ L)	1989	87/89	pCt
Pertanian	1,653,496	5,30	0,828	4,39	1,702	2,814,250	1,160,754	43.13
Pertambangan	2,650	6,60	0,778	5,13	1,821	4,826	2,176	0.08
Industri	382,948	12,70	0,432	5,49	1,878	719,176	336,228	12.49
Listrik, Gas & Air	1,356	9,20	1,142	10,51	2,682	3,637	2,281	0.08
Konstruksi	34,852	10,20	0,399	4,07	1,651	57,541	22,689	0.84
Perdagangan	383,187	9,30	0,632	5,88	1,941	743,766	360,579	13.40
Transportasi	63,210	12,10	0,404	4,89	1,782	112,640	49,430	1.84
Bank & Lembaga Keu.	11,258	10,40	1,965	20,44	4,270	48,072	36,814	1.37
Pemerintahan & Jasa	356,223	9,40	1,345	12,64	3,022	1,076,505	720,282	26.76
T o t a l	2,889,180	7.60	0.805	6.12	1,979	5,717,687	2,691,233	100.00

Sumber : Kantor BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan
KANWIL Tenaga Kerja Sulawesi Selatan
Data Telah Diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap ke berbagai sektor memperlihatkan adanya peningkatan, dimana apabila diperhatikan berdasarkan periode tahun 1987 sampai 1989 jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian bertambah 1.160.754 jiwa, sektor pertambangan 2.176 jiwa, sektor industri 336.228 jiwa, sektor listrik 2.281 jiwa, sektor konstruksi 22.689 jiwa, sektor perdagangan 360.579 jiwa, sektor transportasi 49.430 jiwa, sektor lembaga keuangan 36.814 jiwa, serta sektor pemerintahan dan jasa sebesar 720.282 jiwa.

Apabila dilihat dari segi persentasi, maka sektor pertanian yang diharapkan paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 43,13 % kemudian yang kedua sektor pemerintahan dan jasa sebesar 26,76 % dan ketiga adalah sektor perdagangan sebesar 13,40 % dan keempat adalah sektor industri sebesar 12,49 %.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai rangkuman akhir dari pada rangkaian pembahasan skripsi ini, penulis mencoba untuk menarik beberapa simpulan dan saran sebagai berikut :

6.1 Simpulan

Bertolak dari masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya adalah :

1. Penduduk Sulawesi Selatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,73 % per tahun, pada tahun 2005 jumlah penduduk Sulawesi Selatan diperkirakan mencapai 9.026.363 jiwa yang berarti akan meningkat sebesar 2.618.643 jiwa atau sebesar 40,87 %.
Tenaga kerja dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,66 % per tahun, pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai 6.365.384 jiwa yang berarti meningkat 1.781.321 jiwa atau sebesar 38,86 %.
Angkatan kerja dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,09 % per tahun berarti meningkat sebesar 1.009.707 jiwa atau meningkat sebesar 51,21 %.
2. Tingkat partisipasi kerja (TPK) pada tahun 1985 sebesar 43,01 % dan pada tahun 1990 mengalami peningkatan menjadi 43,94 % yang berarti meningkat sebesar 0,93 % dan pada tahun 2005, TPK diperkirakan akan mencapai 46,84 % atau akan mengalami peningkatan sebesar 2,9 %.
3. Sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB Sulawesi

Selatan ternyata mengalami peningkatan dengan demikian, maka berarti turut mempengaruhi laju kesempatan kerja sebagai akibat dari naik turunnya elastisitas kesempatan kerja.

4. Sektor pertanian, perdagangan, industri dan pemerintahan dan jasa merupakan empat sektor yang diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kesempatan kerja di Sulawesi Selatan, maka penulis menyarankan :

1. Banyaknya tenaga kerja yang tersebar di sektor pertanian, sehingga perlu dipikirkan untuk upaya penyebaran ke sektor ekonomi lainnya melalui pemberian pendidikan dan keterampilan para tenaga kerja tersebut.
2. Pada sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja kiranya perlu ditingkatkan proyek-proyek yang bersifat pada karya agar penyebaran tenaga kerja yang berlebihan pada salah satu ekonomi tertentu dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

01. Akley Gardner., Teori Ekonomi Makro, (Terjemahan). Jakarta : U.I. Press, 1983
02. Bakir Zainab & Manning., Angkatan Kerja di Indonesia. ✓
Jakarta : CV. Rajawali, 1984
03. Djojohadikusumo, Sumitro., Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Masa Kini dan Mendatang. Jakarta : LP3ES, 1975.
04. Djojohadikusumo, Sumitro., Masalah Penduduk dan Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Indira, 1986.
05. Glassburner Bruce & Chandra Aditiawan., Teori dan Kebijakanaksanaan Ekonomi Makro. Jakarta : LP 3 ES, 1978. ✓
06. Johannes, H. & Budiono Sri Handoko., Pengantar Matematika Untuk Ekonomi. Jakarta : LP 3 ES, 1981.
07. Kamaluddin Rustian., Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
08. Keyfitz, Nathan & Nitisastro, Widjojo., Soal Penduduk dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta : PT. Pembangunan, 1964.
09. Munir Rozy & Budiarto., Teori-Teori Kependudukan. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983.
10. Simanjuntak, Payaman., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. ✓
Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1983.

11. Sukirno Sadono., Ekonomi Pembangunan. Medan : Borta ✓
Gorat, 1981.
12. Tadang, Ambar., Ekonomi Pembangunan, Problem Dasar dan ✓
Teori Pembangunan. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1981.
13. Todaro, P. Micael., Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang ✓
Berkembang (Buku I). Terjemahan Nooroso Kuharjo.,
Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1984.

Bahan Bacaan, Majalah Ilmiah / Diklat :

1. Amiroellah, BM., Masalah Kependudukan., Ujung Pandang :
1983.
2. M.M. Papayungan., Ekonomi Sumber Daya Manusia. (Diklat ✓
I.a. Bahan Kuliah SI) Fakultas Ekonomi Universitas
Hasanuddin Ujung Pandang, 1984.
3. Syamsu Isa, H.M. : Perencanaan Tenaga Kerja.
4. Prisma, No. 11/12. Jakarta : LP 3 ES, 1983.
5. Prisma, No. 1. Jakarta : LP 3 ES, 1979.